

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN TAHUN 2026**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)**
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima – Serang Telp. (0254) 267142 Fax (0254) 267143



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2026 mempunyai arti strategis dan hasil daripada musyawarah, koordinasi serta beberapa kali pengevaluasian demi pencapaian tujuan dan sasaran yang efektif, terarah dan terkoordinasi.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2026 ini, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan selanjutnya.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagai dokumen Perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.

Serang, Agustus 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	14
2.4 Kinerja Pelayanan OPD	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	31
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2 Tujuan dan Sasaran	31
3.3 Indikator Kinerja Utama	32
3.4 Target Indikator Kinerja Utama	32
3.5 Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	68
BAB V PENUTUP	83



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan tahapan yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi kinerja/pelaksanaan rencana. Ke empat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan dilaksanakan secara transparan dan berkesinambungan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026;
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2026 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya



Sejalan dengan tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2026 yaitu “Pembangunan non Infrastruktur untuk membangun secara mental pola pikir manusia dalam membantu percepatan pertumbuhan ekonomi menuju sejahtera” dan kebijakan strategis Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, meningkatkan peran serta masyarakat madani (*civil society*), meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik dan mengembangkan kelembagaan demokrasi lokal.

Untuk dapat mewujudkan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2026 serta melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten akan menyusun Rencana Kerja Tahun 2025.

Penyusunan Renja OPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke-6 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang akan dicantumkan dalam KUA dan PPAAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran OPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Kesbangpol Provinsi Banten dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
17. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun yang lalu 2025 dan tahun berjalan 2026, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesbangpol Provinsi Banten tahun 2026.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Banten Tahun 2026, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN,



Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Resntra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD,

Bab Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun 2025) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2026), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis kinerja pelayanan OPD,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD,

Berisikan uraian mengenai :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 4) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.



BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3 Program dan Kegiatan (sebagaimana format terlampir)

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP,

Berisikan Uraian penutup, berupa :

- a Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c Rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Secara bahasa evaluasi berasal dari bahasa Inggris “evaluation” yang berarti penaksiran atau penilaian, selanjutnya secara harfiah evaluasi berarti proses penentuan nilai suatu hal atau objek berdasarkan referensi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Tujuan evaluasi yaitu : (1) Untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. (2) Untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatannya sehingga dapat dilakukan diagnosis/penelitian dan kemungkinan memberikan remedia teaching/perbaiki kegiatan.

Selanjutnya, Rencana Kinerja atau Renja rencana kerja tahunan, merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Perencanaan kinerja secara jelas mendefinisikan tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang realistis yang konsisten dengan misi tersebut dalam kerangka waktu yang ditentukan dalam kapasitas organisasi untuk implementasi.

Selanjutnya, Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Sehingga perlu adanya evaluasi penggunaan program kerja yang menggunakan anggaran baik APBD maupun APBN tentang keberhasilan dan kurang optimalnya dalam menyelenggarakan suatu program kegiatan yang telah di rencanakan pada awal usulan program dan kegiatan tahun sebelumnya, agar usulan tahun berikutnya lebih optimal dan efektif dalam melakukan suatu program melalui baik kegiatan fisik maupun non fisik demi tercapainya suatu pembangunan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan /kegagalan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan Kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Evaluasi Kinerja (performance appraisal) merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran-ukuran dan Indikator serta hasil pengukuran kinerja. Evaluasi Kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program / kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya



- Kinerja Keuangan

Anggaran Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sebesar Rp. 67.457.274.740,00 (per Agustus 2025) dengan 6 program dan 12 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 54.556.544.571 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 83,28%.

- Kinerja Program dan Kegiatan

Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2025, diperoleh hasil capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten per Agustus 2025 sebesar 83,28%. Dengan capaian kinerja sebesar 83,28%. tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil/Sangat memuaskan dalam pencapaian kerjanya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
Tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi terget kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 - 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
 - 4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 - 6) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Untuk mendukung pelaksanaan dari program tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten terdapat 12 Kegiatan dengan 64 Sub Kegiatan yang mana realisasi kinerja dari semua kegiatan tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
Tidak ada program/kegiatan yang melebihi keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan:
 - a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/ kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
 - b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia; serta
 - c. Efektivitas dan Efisiensi penggunaan Sumber Daya yang ada.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD:



Target capaian program Renstra tahun 2023 - 2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).

- 6. Kebijakan-kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil:
 - a. Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang dirasakan masih adanya keterlambatan realisasi pertanggungjawaban keuangan, namun dalam pelaksanaan kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan.
 - b. Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan. diperlukan penambahan pegawai agar pekerjaan dapat terbagi tidak tertumpuk terhadap satu pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai. Serta penugasan bimbingan dan pelatihan bagi pegawai yang ada secara merata.
 - c. Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada. Aspek kerugian negara diupayakan risikonya dapat diminimalisir. kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada senantiasa dilakukan dengan mengikuti prosedur dan sistem sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.1
Program, Indikator Kinerja Program dan Outcome**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	OUTCOME
1.	2.	3.	4.
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Ketercapaiannya dari seluruh kegiatan pada program penunjangurusan pemerintahan daerah provinsi - Persentase Ketercapaiannya dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan 	MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI



			daerah provinsi	
		-	Persentase Ketercapaiannya dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	
2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	Persentase Realisasi Capaian Pembinaan dan Penguatan 4 Konsensus DasarKebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI)	MENINGKATNYA Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	-	Nilai IDI Pada poin hak-hak politik	MENINGKATNYA Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
4	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Capaian Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	MENINGKATNYA Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil	MENINGKATNYA Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
6	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	-	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial yang terjadi di wilayah	MENINGKATNYA Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial



b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pengukuran kinerja adalah proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses pelayanan publik.

Kinerja satuan organisasi/kerja banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai perolehan kinerja atas pelayanan yang dilakukan. Nampaknya masyarakat belum puas atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan. Di samping itu, selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari satuan organisasi/kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk mencapai kualitas efektifitas.

Menurut KBBI, indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk, keterangan atau cirri-ciri. Indikator juga dapat menjadi acuan dalam mencapai suatu tujuan. Indikator dapat digunakan untuk mengetahui faktor perubahan dalam mencapai mencapai tujuan tersebut. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.

Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut dibawah ini adalah Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Kriteria Kinerja	Faktor Pendukung/Penghambat/Permasalahan
Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)							
Badan Ksatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan stabilitas Daerah yang Kondusif untuk Mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	77,91	75,83	100%	BAIK	Karena ada beberapa komponen dalam penilaian IDI yang terabaikan, yaitu : 1. tidak dihapunya perda yang ada di JDIH Banten terkait kebijakan anak sekolah, 2. tidak diterbitkannya



						terkait kajian peraturan oleh Sekretariat DPRD Banten	
		Penanganan Konflik Masyarakat	100	100	100%	Sangat Tinggi	Karena didukung secara optimal oleh Tim Terpadu Banten dan Forkopimda Provinsi Banten bersama unsur masyarakat Banten

c. Evaluasi Program Tahun 2025

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada tahun 2025 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Provinsi Banten. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada per Agustus tahun 2025 adalah, berikut di bawah ini :

Tabel 2.3
Realisasi Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per Agustus Tahun 2025

1.	Program	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	Kegiatan	:	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Anggaran	:	Rp 17.502.158.520
	Realisasi	:	Rp 8.606.304.009
	Prosentase realisasi	:	54,11%
2.	Program	:	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	Kegiatan	:	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Anggaran	:	Rp 2.374.853.220
	Realisasi	:	Rp 426.041.715
	Prosentase realisasi	:	42,46%
3.	Program	:	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
	Kegiatan	:	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan



		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
	Anggaran	: Rp 30.935.405.000
	Realisasi	: Rp 30.861.254.886
	Prosentase realisasi	: 99,76%
4	Program	: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	Kegiatan	: - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Anggaran	: Rp 4.611.510.000
	Realisasi	: Rp 4.492.930.599
	Prosentase realisasi	: 98,59%
5.	Program	: PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	Kegiatan	: - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	Anggaran	: Rp 460.350.000
	Realisasi	: Rp 267.949.192
	Prosentase realisasi	: 74,13%
6.	Program	: PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
	Kegiatan	: - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
	Anggaran	: Rp 11.572.998.000
	Realisasi	: Rp 9.902.064.170
	Prosentase realisasi	: 86,00%

d. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2025

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2025 dengan usulan sebesar **Rp. 67.457.274.740** (sebelum perubahan) terurai dalam 6 program, 12 kegiatan dan 64 Sub Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2026, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan data dan informasi;
- 2) Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- 3) Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

f. Analisis Kinerja Pelayanan OPD



Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik/sumber daya, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*/dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*/Daftar anggaran belanja.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam membantu Gubernur Banten, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas pelayanan di Provinsi Banten mengalami peningkatan. Namun peningkatan kualitas pelayanan perlu di tata dan dikelola scara terstruktur, rapi agar mendapatkan data yang akurat untuk pengelolaan kegiatan pembangunan selanjutnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- 1 Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- 2 Masih kurangnya keakuratan data dan ketepatan dalam menentukan kebijakan setelah data dianalisis.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal diantaranya harmonisasi kebijakan (Masih ada kebijakan yang belum disesuaikan/diperbarui/direvisi sesuai dengan kondisi saat ini), ketersediaan data (data sektoral pembangunan belum lengkap tersedia, koordinasi dengan SKPD lain perludi tingkatkan terkait data), Kurangnya Jumlah dan kemampuan SDM. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

a Isu Strategis

- 1) Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas Daerah;



- 2) Meningkatkan Kualitas Demokrasi untuk Keamanan dan Stabilitas Daerah.

Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum sehingga berimplikasi pada bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam masa transisi/peralihan tidak merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai tugas pokok : "Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik". dan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 3. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kewaspadaan Nasional;
 4. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
 5. Perumusan kebijakan teknis dibidang Fasilitasi Pembinaan Politik;
- b Strategi Badan Kesbangpol Provinsi Banten
- 1) Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas Daerah;
 - 2) Meningkatkan Kualitas Demokrasi untuk Keamanan dan Stabilitas Daerah.
- c Arah Kebijakan Badan Kesbangpol Provinsi Banten
- 1) Peningkatan kualitas pembinaan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM;
 - 2) Peningkatan Kualitas Pemahaman masyarakat terhadap penegakan demokrasi.
- d Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Provinsi Banten
- 1) Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah;
 - 2) Persentase Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM yang ditangani;
 - 3) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten.
- e Rencana Kegiatan

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dirumuskan sejumlah kegiatan sebagai pengerahan sejumlah sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang selaras dengan tujuan Program.

Kegiatan-kegiatan pada setiap Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat



- Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 5) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Kegiatan Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
 3. Kegiatan Pada Program Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 4. Kegiatan Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 5. Kegiatan Pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 6. Kegiatan Pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah proses penting untuk menilai pencapaian target kinerja, penyerapan dana, dan identifikasi kendala selama periode anggaran tertentu. Evaluasi ini melibatkan perbandingan target rencana dengan realisasi aktual, menggunakan indikator kinerja, serta analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan berkelanjutan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta masukan untuk perencanaan Renja dan anggaran pada periode berikutnya.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2026 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi pada RPJMD.



Selanjutnya tabel dibawah ini merujuk pada tabel Renstra 2023-2026 dikarenakan menunjukkan dalam tabel tersebut terdapat program dan kegiatan tahun 2025, Sebab pembangunan dirumuskan secara berkelanjutan dan progresif. Secara umum dalam evaluasi ini bahwa pelaksanaan rencana kerja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun lalu melalui evaluasi secara diagnosa harus di padukan dengan Rencana Stratgis/Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dibuat terlebih dahulu sebagai pedoman untuk membuat Renja/Rencana Kerja tahunan termasuk Renja tahun 2025 ini, secara evaluasi apakah sudah sesuai dengan Renstra atau masih harus ada perbaikan dalam melaksanakan kegiatan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Provinsi Banten 2023 s/d Tahun 2026 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.



Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD 2023 s/d Tahun 2026
Provinsi Banten

Nama SKPD: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
				Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6=5/4
	Pemerintahan Umum				
	Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah) OPD	70-80	0	100%
		Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	78	0	100%
		Penanganan Konflik Masyarakat	100%	0	100%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	0	100%
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	0	100%



						Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	0	100%
						Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	0	100%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	0	100%
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/14 bulan	0	100%
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0	100%
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	100%
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0	100%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	100%
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	100%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0	100%
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	100%



					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	0	100%
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	0	100%
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	0	100%
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	0	100%
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dok	0	100%
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	0	100%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	0	100%
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0	100%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100%	0	100%
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	0	100%
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0	100%
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	0	100%



						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	0	100%
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25 Orang	0	100%
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	25 Orang	0	100%
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	0	100%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100%	0	100%
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	0	100%
						Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	0	100%
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	100%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0	100%
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0	100%
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	100%
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	0	100%
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0	100%
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	0	100%
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	0	100%



					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0	100%
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0	100%
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	0	100%
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	0	100%
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	0	100%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0	100%
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39 unit	0	100%
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 Paket	0	100%
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	0	100%
					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase realisasi capaian pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI)	100%	0	100%
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	0	100%
						Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Dokumen	0	100%



						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	9 Dokumen	0	100%
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Orang/Lembaga	0	0
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 Orang	0	100%
						Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	0	100%
						Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	2 Dokumen	0	100%
						Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	500 Orang	0	100%
						Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	1 Dokumen	0	100%
						Pelaksanaan tugas Paskibraka	1 Dokumen	0	100%
						Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	0	100%
						Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	0	100%



					Pembentukan Paskibraka	500 Dokumen	0	100%
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Nilai IDI Pada poin hak-hak politik	78,75%	0	100%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	0	100%
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Dokumen	0	100%
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Dokumen	0	100%



						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Orang/Lembaga	0	100%
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	0	100%
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	0	100%
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase capaian pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	75%	0	100%
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	0	100%
						Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Dokumen	0	100%



					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Dokumen	0	100%
					Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	0	100%
					Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	0	100%
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6 Laporan	0	100%
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil	75%	0	100%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	0	100%
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	0	100%
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	0	100%



					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Orang/Lembaga	0	100%
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	0	100%
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	0	100%
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah	100%	0	100%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Presentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	0	100%
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Dokumen	0	100%



						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Dokumen	0	100%
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 Orang/Lembaga	0	100%
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	0	100%
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	0	100%
						Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	0	100%



2.4 Kinerja Pelayanan OPD

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Banten adalah sesuai tabel berikut :

**Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD
Badan Kesbangpol Provinsi Banten**

No	Indikator	SPM	IKK	Realisasi Capaian	Target Capaian	Catatan
				Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n-1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Nilai IKM (Satuan : Skala)	-	Realisasi Belanja per Total APBD x 100%	-	-	-
	Angka Partisipasi Pilpres	-		-	-	
	Angka Partisipasi Pileg	-		-	-	
	Angka Partisipasi Pilgub	-		-	-	
	Angka Partisipasi Pilkada	-		-	-	
	Persentase Ormas yang mendapatkan pembinaan (Satuan : %)	-		75%	75%	
	Cakupan Pembinaan dan Penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) (Satuan : Kegiatan)	-		80%	80%	
	Persentase penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam daerah (Satuan : %)	-		100%	100%	



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional
Provinsi Banten

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Kesatuan Bangsa dan Politik	RENSTRA Kementerian Dalam Negeri 2023-2026	

Badan Kesbangpol Provinsi Banten akan melaksanakan telaahan kebijakan nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang direncanakan.

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan

1. Mewujudkan Hubungan Sinergis dan Harmonis Antara Suprastruktur Dengan Infrastruktur Politik;
2. Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat;
3. Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat;
4. Meningkatkan Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat;
5. Mewujudkan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara;
6. Meminimalisir Potensi Konflik Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara;
7. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
8. Memantapkan Kapasitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan.

3.2.2. Sasaran

1. Terlaksananya Hubungan Kerjasama Sinergis dan Harmonis Antara Suprastruktur Dengan Infrastruktur Politik;
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Politik Masyarakat;
3. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.
4. Meningkatnya Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan
5. Terwujudnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
6. Tersedianya Sistem Informasi Potensi Konflik dan Isu-Isu Strategis.
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
8. Optimalisasi Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

3.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Provinsi Banten yaitu:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
1.	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien
2.	Meningkatnya Stabilitas Daerah	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	Capaian Poin Demokrasi Kategori Baik dan Berkualitas pada Aspek Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Institusi Demokrasi
		Penanganan Konflik Masyarakat	Penurunan Angka Peristiwa Kriminalitas di Provinsi Banten (ideologiradikal, isuseparatisme, sumberdaya ekonomi)

3.4 Target Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Target indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Target Indikator Kinerja Utama 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	70-80 Nilai
2.	Meningkatnya Stabilitas Daerah	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	78,75 Nilai
		Jumlah konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM	100 Persen

3.5 Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah

Penyusunan sasaran program dan kegiatan perangkat daerah yang didasarkan pada pendekatan kinerja, perencanaan, dan penganggaran terpadu berarti bahwa penetapan tujuan dan aktivitas harus selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah, didukung oleh pengukuran kinerja yang jelas, dan diintegrasikan dengan proses penganggaran secara keseluruhan, sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pemerintah daerah.

Selanjutnya proses penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah yang didasarkan pada pendekatan kinerja, perencanaan, dan penganggaran yang terpadu, serta pentingnya pembahasan antar-perangkat daerah dalam forum untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah, sebuah dokumen tahunan yang menjabarkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra) ke dalam tindakan operasional untuk mencapai visi daerah. Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah tidak disusun secara sporadis, melainkan melalui pendekatan yang menyatukan aspek kinerja, perencanaan strategis, dan penganggaran, yang bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas.

Dokumen 5 tahunan yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pembahasan program dan kegiatan antar-perangkat daerah dilakukan dalam sebuah forum yang bertujuan untuk menyelaraskan dan mengoptimalkan upaya dalam mencapai target pembangunan. Dokumen tahunan yang disusun berdasarkan Renstra dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), menjabarkan program dan kegiatan operasional, termasuk lokasi, indikator kinerja, sasaran, dan pendanaan.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2023-2026 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi pada RPJMD tahun 2023-2026.

Proses penganggaran menjadi satu kesatuan dengan proses perencanaan dan pengukuran kinerja, memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana tabel sasaran program dan kegiatan di bawah ini.



Tabel 3.4
Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah

Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program pada tahun ke					Kinerja Akhir RPJMD
					1	2	3	4	5	
8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	IKM	Indeks	2.8	3.2	3.3	3.53	3.3	3.45	3.46
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%				100	100	100	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%				100	100	100	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%				100	100	100	100
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%				100	100	100	100
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		%	100	100	100	100	100	100	100



Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program pada tahun ke					Kinerja Akhir RPJMD
					1	2	3	4	5	
8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23
	perangkat daerah									
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		%	100	100	100	100	100	100	100
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah		%	100	100	100	100	100	100	100
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah		%	100	100	100	100	100	100	100
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunya laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah		%	100	100	100	100	100	100	100
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		%	100	100	100	100	100	100	100
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		%	100	100	100	100	100	100	100



Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program pada tahun ke					Kinerja Akhir RPJMD
					1	2	3	4	5	
8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23
Program : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase realisasi capaian pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI)	Indeks Demokrasi Indonesia	%	100	100	100	100	100	100	100
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		%	100	100	100	100	100	100	100
Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Nilai IDI pada hak-hak Politik	Indeks Demokrasi Indonesia	%	75.82	76,32	77,55	78,38	79,85	80,05	81.00
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Dok	9	9	9	9	9	9	165



Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program pada tahun ke					Kinerja Akhir RPJMD
					1	2	3	4	5	
8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23
Program : Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Presentase capaian pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Masyarakat	Presentase capaian pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		%	100	100	100	100	100	100	100
Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil		Nilai	75.82	76,32	77,55	78,38	79,85	80,05	81.00
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		%	100	100	100	100	100	100	100
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Presentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah		%	100	100	100	100	100	100	100



Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program pada tahun ke					Kinerja Akhir RPJMD
					1	2	3	4	5	
8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23
KEGIATAN: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		%	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.5
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Beserta Target Dan Kebutuhan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
KESBANGPOL												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Nilai)	73,39	80.00	23.237.644.272	83.00	23.643.452.000	85.00	24.234.538.000	87.00	24.840.402.000	90.00	25.461.412.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,	100%	100%	424.835.000	100%	443.954.000	100%	471.954.000	100%	535.307.000	100%	542.307.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	110.100.000	2 Dok	120.000.000	2 Dok	130.000.000	2 Dok	156.661.000	2 Dok	160.661.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dok	1 Dok	4.900.000	1 Dok	4.900.000	1 Dok	4.900.000	1 Dok	4.900.000	1 Dok	4.900.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2 Dok	1 Dok	3.900.000	1 Dok	3.900.000	1 Dok	3.900.000	1 Dok	3.900.000	1 Dok	3.900.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dok	1 Dok	4.900.000	1 Dok	4.900.000	1 Dok	4.900.000	1 Dok	4.900.000	1 Dok	4.900.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
	Dokumen DPA-SKPD											
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	1 Dok	4.900.000	1 Dok	4.900.000	1 Dok	4.900.000	1 Dok	4.900.000	1 Dok	4.900.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	16 Laporan	28.200.000	16 Laporan	28.200.000	16 Laporan	30.200.000	16 Laporan	35.200.000	16 Laporan	36.200.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10 Laporan	125.518.000	10 Laporan	125.518.000	10 Laporan	135.518.000	10 Laporan	155.210.000	10 Laporan	156.210.000
Pelaksanaan Pengumpulan Data	Jumlah Data Statistik Sektoral	0	1 Data	22.460.000	1 Data	30.460.000	1 Data	32.460.000	1 Data	42.460.000	1 Data	43.460.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	
Statistik Sektoral Daerah	Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah												
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1 Berita Acara	32.960.000	1 Berita Acara	32.960.000	1 Berita Acara	34.960.000	1 Berita Acara	34.960.000	1 Berita Acara	35.960.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	0	1 Dok	86.997.000	1 Dok	88.216.000	1 Dok	90.216.000	1 Dok	90.216.000	1 Dok	91.216.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah (%)	100%	100%	18.213.005.913	100%	18.538.206.000	100%	19.036.607.000	100%	19.497.118.000	100%	19.977.017.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan	71 Orang/Bulan	17.513.335.913	71 Orang/Bulan	17.776.036.000	71 Orang/Bulan	18.220.437.000	71 Orang/Bulan	18.675.948.000	71 Orang/Bulan	19.142.847.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	12 Dok	513.670.000	12 Dok	563.670.000	12 Dok	603.670.000	12 Dok	608.670.000	12 Dok	671.670.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	12 Dok	27.488.000	12 Dok	30.488.000	12 Dok	32.488.000	12 Dok	32.488.000	12 Dok	32.488.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	12 Dok	29.580.000	12 Dok	32.580.000	12 Dok	34.580.000	12 Dok	34.580.000	12 Dok	34.580.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	43.500.000	1 Laporan	45.500.000	1 Laporan	45.500.000	1 Laporan	45.500.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
	Tahun SKPD											
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	1 Dok	40.400.000	1 Dok	43.400.000	1 Dok	47.400.000	1 Dok	47.400.000	1 Dok	47.400.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	30.900.000	18 Laporan	30.900.000	18 Laporan	32.900.000	18 Laporan	32.900.000	18 Laporan	32.900.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	17.632.000	1 Dok	17.632.000	1 Dok	19.632.000	1 Dok	19.632.000	1 Dok	19.632.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase Ketercapaian	100%	100%	70.000.0000	100%	85.000.00	100%	94.000.000	100%	100.000.000	100%	109.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	
Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)					0							
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok	2 Dok	30.000.000	2 Dok	35.000.000	2 Dok	38.000.000	2 Dok	40.000.000	2 Dok	45.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	28.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	32.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	28.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	32.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	425.437.080	100%	441.437.080	100%	450.122.080	100%	466.122.080	100%	488.233.080	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	(%)											
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	197.300.000	1 Paket	200.300.000	1 Paket	203.300.000	1 Paket	210.300.000	1 Paket	212.300.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	20.496.000	1 Dok	22.496.000	1 Dok	25.496.000	1 Dok	26.496.000	1 Dok	27.496.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dok	1 Dok	45.360.000	1 Dok	48.360.000	1 Dok	48.360.000	1 Dok	49.360.000	1 Dok	51.471.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dok	1 Dok	49.680.000	1 Dok	51.680.000	1 Dok	51.680.000	1 Dok	53.680.000	1 Dok	59.680.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang	12.912.000	25 Orang	14.912.000	25 Orang	14.912.000	25 Orang	16.912.000	25 Orang	19.912.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25 Orang	23.120.000	25 Orang	24.120.000	25 Orang	26.805.000	25 Orang	28.805.000	25 Orang	31.805.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	77 Orang	76.569.080	77 Orang	79.569.080	77 Orang	79.569.080	77 Orang	80.569.080	77 Orang	85.569.080
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (%)	100%	100%	934.528.900	100%	942.528.900	100%	956.528.900	100%	968.528.900	100%	990.528.900
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	340.765.400	1 Paket	342.765.400	1 Paket	345.765.400	1 Paket	347.765.400	1 Paket	352.765.400
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000	1 Paket	102.000.000	1 Paket	104.000.000	1 Paket	106.000.000	1 Paket	109.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	102.000.000	12 Laporan	104.000.000	12 Laporan	106.000.000	12 Laporan	109.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	319.463.500	12 Laporan	320.463.500	12 Laporan	323.463.500	12 Laporan	325.463.500	12 Laporan	329.463.500
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	27.000.000	1 Dok	29.000.000	1 Dok	33.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dok	12 Dok	49.300.000	12 Dok	50.300.000	12 Dok	52.300.000	12 Dok	54.300.000	12 Dok	57.300.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	100%	250.000.000	100%	257.000.000	100%	267.000.000	100%	276.000.000	100%	292.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
	Urusan Pemerintah Daerah (%)											
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	50.000.000	1 Unit	52.000.000	1 Unit	53.000.000	1 Unit	55.000.000	1 Unit	59.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	50.000.000	1 Unit	52.000.000	1 Unit	53.000.000	1 Unit	55.000.000	1 Unit	59.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	50.000.000	1 Paket	52.000.000	1 Paket	53.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	59.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	100.000.000	1 Unit	105.000.000	1 Unit	108.000.000	1 Unit	111.000.000	1 Unit	115.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	yang Disediakan											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	100%	1.947.955.920	100%	1.959.444.561	100%	1.970.444.561	100%	1.998.444.561	100%	2.017.444.561
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Laporan	187.000.000	1 Laporan	190.000.000	1 Laporan	193.000.000	1 Laporan	206.000.000	1 Laporan	209.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	632.560.000	12 Laporan	634.560.000	12 Laporan	638.560.000	12 Laporan	644.560.000	12 Laporan	649.560.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12 Laporan	12 Laporan	404.428.000	12 Laporan	406.442.800	12 Laporan	408.442.800	12 Laporan	412.442.800	12 Laporan	419.442.800



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
	Disediakan											
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	723.967.920	12 Laporan	728.441.761	12 Laporan	730.441.761	12 Laporan	735.441.761	12 Laporan	739.441.761
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	100%	971.881.459	100%	975.881.459	100%	987.881.459	100%	998.881.459	100%	1.044.881.459
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	29 Unit	389.080.100	29 Unit	389.080.100	29 Unit	395.080.100	29 Unit	399.080.100	29 Unit	415.080.100
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya	105 Unit	105 Unit	279.996.000	105 Unit	281.996.000	105 Unit	286.996.000	105 Unit	289.996.000	105 Unit	299.996.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
	yang Dipelihara											
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	1 Unit	1 Unit	302.805.359	1 Unit	303.805.359	1 Unit	305.805.359	1 Unit	309.805.359	1 Unit	329.805.359
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten dalam Aspek Kebebasan pada Indikator Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat (Nilai)	94,34	94,36	2.730.590.745	94.38	4.537.232.000	94.39	4.798.097.000	94.40	6.441.567.000	94.40	5.455.369.000
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat Yang Meningkat Pemahaman Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan	100%	100%	2.730.590.745	100%	4.537.232.000	100%	4.798.097.000	100%	6.441.567.000	100%	5.455.369.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
	Karakter Kebangsaan											
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dok	1 Dok	100.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	203.802.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	9 Dok	4 Dok	303.744.000	4 Dok	350.744.000	4 Dok	400.744.000	4 Dok	400.744.000	4 Dok	420.744.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi	Jumlah Orang yang Mengikuti	150 orang	300 orang	337.436.000	350 orang	887.436.000	400 orang	987.436.000	450 orang	1.587.436.000	500 orang	987.436.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					0							
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 orang	180 orang	181.311.745	200 orang	191.815.000	220 orang	211.815.000	250 orang	211.815.000	280 orang	211.815.000	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi	3 Laporan	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan												
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	2 Dok	2 Dok	50.000.000	2 Dok	100.000.000	2 Dok	100.000.000	2 Dok	100.000.000	2 Dok	100.000.000	
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta	Jumlah Purnapaskibraka	500 Orang	500 Orang	50.000.000	500 Orang	100.000.000	500 Orang	100.000.000	500 Orang	200.000.000	500 Orang	210.000.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	
Pancasila	Duta Pancasila												
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	210.000.000	
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dok	4 Dok	1.108.099.000	4 Dok	1.907.237.000	4 Dok	1.948.102.000	4 Dok	2.541.572.000	4 Dok	2.041.572.000	
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	210.000.000	
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dok	2 Dok	50.000.000	2 Dok	100.000.000	2 Dok	100.000.000	2 Dok	200.000.000	2 Dok	210.000.000	
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	500 orang	500 orang	400.000.000	80 orang	450.000.000	80 orang	450.000.000	80 orang	500.000.000	80 orang	550.000.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten dalam Aspek Kebebasan pada Indikator Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat (Nilai)	97,80	97,83	31.967.014.000	97,86	34.994.128.000	97,88	37.006.084.000	97,90	698.006.127.000	97,92	42.075.405.000
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan Aktif dalam Etika dan Budaya Politik	100%	100%	31.967.014.000	100%	34.994.128.000	100%	37.006.084.000,	100%	698.006.127.000	100%	42.075.405.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	
Situasi Politik													
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dok	1 Dok	91.890.000	1 Dok	120.890.000	1 Dok	130.890.000	1 Dok	437.300.000	1 Dok	200.890.000	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	2 Dok	1 Dok	101.274.000	1 Dok	191.274.000	1 Dok	201.274.000	1 Dok	1.245.600.000	1 Dok	350.274.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun											
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	12 orang	400 orang	31.576.794.000	500 orang	34.370.908.000	650 orang	36.342.864.000	700 orang	693.791.282.000	750 orang	40.993.185.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	
	Situasi Politik di Daerah												
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 orang	120 orang	98.312.000	140 orang	180.312.000	160 orang	190.312.000	180 orang	1.262.085.000	200 orang	280.312.000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika	4 Laporan	2 Laporan	98.744.000	2 Laporan	130.744.000	2 Laporan	140.744.000	2 Laporan	1.269.860.000	2 Laporan	250.744.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah												
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten dalam Aspek Kebebasan pada Indikator Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan	33,33	75,00	1.095.547.000	75,50	2.268.616.000	75,60	2.399.049.000	75,70	4.670.784.000	75,75	2.727.685.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	
	berkeyakinan dalam setiap kebijakan (Nilai)												
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang berperan Aktif di Masyarakat	100%	100%	1.095.547.000	100%	2.268.616.000	100%	2.399.049.000	100%	4.670.784.000	100%	2.727.685.000	
Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dok	1 Dok	33.376.000	1 Dok	43.445.000	1 Dok	49.445.000	1 Dok	49.445.000	1 Dok	50.445.000	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	2 Dok	2 Dok	140.160.000	2 Dok	160.160.000	2 Dok	180.160.000	2 Dok	210.160.000	2 Dok	220.160.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun											
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 orang	500 orang	869.491.000	550 orang	1.989.491.000	600 orang	2.078.924.000	650 orang	4.290.659.000	700 orang	2.310.560.000
Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	100 orang	70 orang	25.504.000	90 orang	40.504.000	110 orang	45.504.000	130 orang	60.504.000	150 orang	73.504.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	
Daerah	Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah												
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6 Laporan	1 Laporan	27.016.000	1 Laporan	35.016.000	1 Laporan	45.016.000,	1 Laporan	60.016.000	1 Laporan	73.016.000	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Nilai Dimensi Ekonomi pada Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Banten (Nilai)	N/A	6,85	1.039.110.00 0	6,90	453.724.0 00	6,92	479.810.000	6,93	534.157.000	6,95	545.537.000	
Perumusan Kebijakan Teknis Dan	Persentase Pelaku	100%	100%	1.039.110.00 0	100%	453.724.0 00	100%	479.810.000	100%	534.157.000	100%	545.537.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Usaha/Kelompok Masyarakat yang Meningkatkan Pemahaman dalam menjaga Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat												
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dok	2 Dok	35.643.000	2 Dok	38.643.000	2 Dok	40.643.000	2 Dok	54.990.000	2 Dok	56.990.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dok	1 Dok	30.203.000	1 Dok	33.203.000	1 Dok	35.203.000	1 Dok	45.203.000	1 Dok	47.203.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	1 Orang	250 Orang	830.699.000	300 orang	233.699.000	350 orang	248.785.000	400 orang	258.785.000	450 orang	260.785.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
	Kepercayaan di Daerah											
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 orang	130 orang	97.148.000	150 orang	100.148.000	160 orang	105.148.000	180 orang	115.148.000	200 orang	117.148.000
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	4 Laporan	1 Laporan	45.417.000	1 Laporan	48.031.000	1 Laporan	50.031.000	1 Laporan	60.031.000	1 Laporan	63.411.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten dalam Aspek Kebebasan pada Indikator Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara (Nilai)	97,74	97,75	1.942.612.000	97,76	7.173.666.000	97,77	7.586.109.000	97,78	48.471.840.000	97,79	8.625.301.000
Perumusan Kebijakan	Persentase	100%	100%	1.942.612.000	100%	7.173.666.	100%	7.586.109.000	100%	48.471.840.000	100%	8.625.301.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial			0		000		0				
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	3 Dok	1 Dok	20.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	90.000.000	1 Dok	40.000.000
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan	Jumlah Kebijakan di Bidang	3 Dok	1 Dok	32.850.000	1 Dok	52.850.000	1 Dok	72.850.000	1 Dok	130.850.000	1 Dok	90.850.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun											
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	8 orang	400 orang	817.282.000	450 orang	4.368.336.000	500 orang	4.590.779.000	550 orang	45.353.510.000	600 orang	5.471.971.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	
Daerah	Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 orang	100 orang	110.080.000	120 orang	150.080.000	140 orang	190.080.000	160 orang	195.080.000	180 orang	200.080.000	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	90.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dok	1 Dok	882.400.000	1 Dok	2.482.400.000	1 Dok	2.582.400.000	1 Dok	2.582.400.000	1 Dok	2.702.400.000



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan oleh perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Banten.

Selanjutnya kebutuhan dana kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Tahun Anggaran 2026 ini, sebagaimana dapat di tuangkan dalam tabel berikut di bawah ini :



Tabel 4.1
Matrik Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD 2026

OPD: BADAN KESBANGPOL PROVINSI BANTEN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Rancangan Akhir RKPD 2026		Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD 2026		Bertambah/Berurang (7-5)	Keterangan (Rubah KKL/ Rubah Rincian)	Catatan
			Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			64.879.440.956		61.095.707.029	-3.783.733.927		
8.01.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Nilai)	70 Nilai	22.320.833.284	80 Nilai	22.320.833.284	0	Rubah KKL	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	351.880.000	100%	351.880.000	0		
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.800.000	2 Dokumen	50.800.000	0		
8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.600.000	1 Dokumen	7.600.000	0		



8.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.600.000	1 Dokumen	6.600.000	0		
8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.600.000	1 Dokumen	7.600.000	0		
8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.600.000	1 Dokumen	7.600.000	0		
8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	62.400.000	16 Laporan	62.400.000	0		
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	144.860.000	10 Laporan	144.860.000	0		
8.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	29.660.000	1 Data	29.660.000	0		
8.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	34.760.000	1 Berita Acara	34.760.000	0		
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat	100 Persen	17.009.790.317	100 Persen	17.009.790.317	0		



		daerah							
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/Bulan	16.410.120.317	71 Orang/Bulan	16.410.120.317	0	Rubah Rincian	
8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	413.670.000	12 Dokumen	413.670.000	0	Rubah Rincian	
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	27.488.000	12 Dokumen	27.488.000	0	Rubah Rincian	
8.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	29.580.000	12 Dokumen	29.580.000	0	Rubah Rincian	
8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	0	Rubah Rincian	
8.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	40.400.000	1 Dokumen	40.400.000	0	Rubah Rincian	
8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	30.900.000	18 Laporan	30.900.000	0	Rubah Rincian	
8.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	17.632.000	1 Dokumen	17.632.000	0	Rubah Rincian	



8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	20.000.000	100 Persen	20.000.000	0		
8.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	umlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	0	Rubah Rincian	
8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	0	Rubah Rincian	
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	325.437.080	100 Persen	325.437.080	0		
8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	97.300.000	1 Paket	97.300.000	0	Rubah Rincian	
8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	20.496.000	1 Dokumen	20.496.000	0	Rubah Rincian	
8.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	45.360.000	1 Dokumen	45.360.000	0	Rubah Rincian	
8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	49.680.000	1 Dokumen	49.680.000	0	Rubah Rincian	
8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	12.912.000	25 Orang	12.912.000	0	Rubah Rincian	
8.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	23.120.000	25 Orang	23.120.000	0	Rubah Rincian	
8.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	76.569.080	25 Orang	76.569.080	0	Rubah Rincian	



8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100 Persen	689.389.307	100 Persen	844.521.607	155.132.300		
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	240.765.400	1 Paket	286.185.400	45.420.000	Rubah Rincian	
8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	1 Paket	206.472.300	106.472.300	Rubah Rincian	
8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	18.000.000	12 Laporan	18.000.000	0	Rubah Rincian	
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	256.323.907	12 Laporan	256.323.907	0	Rubah Rincian	
8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	28.240.000	3.240.000	Rubah Rincian	
8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	49.300.000	12 Dokumen	49.300.000	0	Rubah Rincian	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.563.364.480	100 Persen	2.542.328.180	-21.036.300		
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	27.000.000	1 Laporan	22.358.700	-4.641.300	Rubah Rincian	
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	532.560.000	12 Laporan	532.557.000	-3.000	Rubah Rincian	
8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	304.428.000	12 Laporan	402.741.000	98.313.000	Rubah Rincian	
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan	1.699.376.480	12 Laporan	1.584.671.480	-114.705.000	Rubah Rincian	



		Disediakan							
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.360.972.100	100 Persen	1.226.876.100	-134.096.000		
8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	889.080.100	29 Unit	889.080.100	0	Rubah Rincian	
8.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	279.996.000	105 Unit	145.900.000	-134.096.000	Rubah Rincian	
8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	191.896.000	1 Unit	191.896.000	0	Rubah Rincian	
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten dalam Aspek Kebebasan pada Indikator Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat (Nilai)	94,36 Nilai	4.054.785.000	94,36 Nilai	3.826.051.073	-228.733.927		
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100 Persen	4.054.785.000	100 Persen	3.826.051.073	-228.733.927		



8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	0	Rubah Rincian
8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	4 Dokumen	203.744.000	4 Dokumen	203.744.000	0	Rubah Rincian
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 Orang	337.436.000	300 Orang	337.436.000	0	Rubah Rincian
8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	180 Orang	191.815.000	180 Orang	128.010.073	-63.804.927	Rubah Rincian



8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	100.000.000	3 Laporan	50.000.000	-50.000.000	Rubah Rincian	
8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	50.000.000	-50.000.000	Rubah Rincian	
8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	500 Orang	100.000.000	500 Orang	50.000.000	-50.000.000	Rubah Rincian	
8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	40.153.000	-59.847.000	Rubah Rincian	
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	4 Dokumen	2.411.790.000	4 Dokumen	2.411.790.000	0	Rubah Rincian	
8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	33.793.000	-66.207.000	Rubah Rincian	
8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	33.793.000	-66.207.000	Rubah Rincian	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	80 Orang	300.000.000	80 Orang	477.332.000	177.332.000	Rubah Rincian	



8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten dalam Aspek Kebebasan pada Indikator Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat (Nilai)	97,83 Nilai	31.450.640.000	97,83 Nilai	31.450.640.000	0		
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	31.450.640.000	100 Persen	31.450.640.000	0		
8.01.03.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	91.890.000	1 Dokumen	91.890.000	0	Rubah Rincian	



8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	51.274.000	1 Dokumen	51.274.000	0	Rubah Rincian
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400 Orang	31.110.420.000	400 Orang	31.110.420.000	0	Rubah Rincian
8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	120 Orang	98.312.000	120 Orang	98.312.000	0	Rubah Rincian



8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	98.744.000	2 Laporan	98.744.000	0	Rubah Rincian	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten dalam Aspek Kebebasan pada Indikator Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan (Nilai)	75,00 Nilai	1.827.054.672	75,00 Nilai	1.027.054.672	-800.000.000		
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Persen	1.827.054.672	100 Persen	1.027.054.672	-800.000.000		
8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	13.376.000	1 Dokumen	13.376.000	0	Rubah Rincian	



8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	140.160.000	2 Dokumen	140.160.000	0	Rubah Rincian	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	1.620.998.672	500 Orang	820.938.672	-800.060.000	Rubah Rincian	
8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	70 Orang	25.504.000	70 Orang	25.564.000	60.000	Rubah Rincian	
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	27.016.000	1 Laporan	27.016.000	0	Rubah Rincian	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Nilai Dimensi Ekonomipada Indeks HarmoniIndonesia (IHAI) Banten (Nilai)	6,87 Nilai	900.000.000	6,87 Nilai	900.000.000	0		



8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	900.000.000	100 Persen	900.000.000	0		
8.01.05.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	75.643.000	2 Dokumen	59.985.000	-15.658.000	Rubah Rincian	
8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	30.203.000	1 Dokumen	30.290.000	87.000	Rubah Rincian	
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250 Orang	351.589.000	250 Orang	364.595.000	13.006.000	Rubah Rincian	



8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	130 Orang	397.148.000	130 Orang	390.993.000	-6.155.000	Rubah Rincian	
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	45.417.000	1 Laporan	54.137.000	8.720.000	Rubah Rincian	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten dalam Aspek Kebebasan pada Indikator Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara (Nilai)	97,75 Nilai	4.326.128.000	97,75 Nilai	1.571.128.000	-2.755.000.000		
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	4.326.128.000	100 Persen	1.571.128.000	-2.755.000.000		



8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	1.800.000	-1.200.000	Rubah Rincian	
8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	32.850.000	1 Dokumen	32.850.000	0	Rubah Rincian	
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	2.057.798.000	400 Orang	986.034.000	-1.071.764.000	Rubah Rincian	



8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	110.080.000	100 Orang	31.960.000	-78.120.000	Rubah Rincian	
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	23.484.000	-16.516.000	Rubah Rincian	
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	2.082.400.000	1 Dokumen	495.000.000	-1.587.400.000	Rubah Rincian	



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Provinsi Banten Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Banten 2023-2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Provinsi Banten serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2026.

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Banten Tahun 2026 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Banten Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Provinsi Banten maupun OPD yang membidangi fungsi lain.